



PSEL DIY Mundur, Jogja Siapkan Opsi Pengelolaan Sampah

TENTANG PSEL



Sampah diolah menjadi energi listrik

Mengurangi penumpukan di TPA

Diklaim tidak menimbulkan bau dan aman bagi lingkungan

Fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi

PSEL DIKEBUT DI LOKASI PRIORITAS

Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di berbagai daerah. Program ini diprioritaskan untuk kawasan dengan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari yang telah masuk kategori darurat.

JOGJA-Operasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) DIY dipastikan mundur hingga 2028. Pemkot Jogja segera memperkuat penanganan sampah dan menyiapkan opsi pengelolaan baru.

Anisatul Umah & Sulthon Sulung Kandiyas
redaksi@jibinews.co

Opsi ini untuk mengantisipasi penutupan sistem *open dumping* di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan pada akhir 2026.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengatakan produksi sampah di Kota Jogja mencapai sekitar 300 ton per hari. Meski demikian, kondisi sampah di depo-depo masih terkendali karena penanganan dilakukan melalui pemilahan sejak

Operasional PSEL DIY *batch* dua diperkirakan baru berjalan pada Juli 2028.

Setelah Desember 2026, sampah yang belum diolah tidak lagi diperbolehkan dibuang secara terbuka.

dari masyarakat.

"Secara umum, Insya Allah pengolahan sampah ini dari hulu kami kerjakan dengan pemilahan, alhamdulillah relatif terkendali," ucapnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Selasa (12/5).

Menurut Hasto, Gerakan Mas JUS atau Masyarakat Jogja Olah Sampah turut membantu menekan volume sampah harian sehingga tidak terjadi penumpukan.

"Kami selesaikan 300 ton, sehingga di depo-depo hari ini tidak ada yang menumpuk," ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY,

Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan operasional PSEL DIY *batch* dua diperkirakan baru berjalan pada Juli 2028. Menurut dia, proses pengerjaan *batch* pertama membutuhkan waktu hingga sekitar 40 bulan.

"Karena memang ada mekanisme yang mungkin juga belum mereka pahami jadi agak panjang," jelasnya.

Made mengatakan pengerjaan *batch* dua diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 18 hingga 24 bulan.

Di sisi lain, Pemda DIY kini mulai menyiapkan berbagai langkah menyusun berakhirnya sistem *open dumping* di TPST Piyungan pada Desember 2026.

Ia menjelaskan persoalan tersebut telah dibahas bersama sekretaris daerah kabupaten dan kota di DIY terkait dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mewajibkan penggunaan sistem *sanitary landfill*.

Setelah Desember 2026, sampah yang belum diolah tidak lagi diperbolehkan dibuang secara terbuka. Sampah harus ditutup menggunakan tanah dan membran sebelum kembali diolah menjadi energi.

PSEL DIY...

“Ini masih kami diskusikan apakah kemudian kami punya opsi lahan yang kami gunakan untuk sementara untuk itu,” jelasnya.

Made juga menyoroti keberadaan pihak ilegal di sekitar TPST Piyungan yang mengambil sampah lalu membakarnya secara sembarangan.

Menurut dia, persoalan tersebut telah dibahas bersama akademisi, tetapi belum ditemukan solusi yang benar-benar efektif.

Made mengatakan daerah dengan keterbatasan lahan seperti Kota Jogja dapat menjalin koordinasi dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terkait pengelolaan sampah.

“Kami bisa sampai dengan

Desember 2026 itu per harinya 20 ton untuk tiga wilayah itu. Sekarang tinggal koordinasi masing-masing wilayah, Kota, Sleman, Bantul, *kayak gitu*,” katanya.

Percepatan Pembangunan

Di sisi lain, Pemerintah Pusat mempercepat pembangunan fasilitas PSEL di sejumlah daerah yang masuk kategori darurat sampah. Percepatan proyek tersebut ditandar dengan penandatanganan kerja sama antara Danantara dan enam pemerintah daerah di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, di Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Enam wilayah itu meliputi

Lampung Raya, Serang Raya, Semarang Raya, Medan Raya, Bogor Raya 2, serta Kabupaten Bekasi sebagai aglomerasi gabungan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memastikan bakal ikut mengawal proyek tersebut agar berbagai kendala di daerah tidak menghambat pembangunan PSEL.

“Insyaallah Kemendagri akan mengawal mulai dari masalah lahan, volume sampah yang diangkut, lingkungan dan lainnya sesuai dengan perintah Pak Mendagri,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/5).

Dukungan tersebut disampaikan

seuai penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan Danantara terkait percepatan pembangunan PSEL di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, di Jakarta.

Bima mengatakan pendampingan dari Kemendagri dilakukan agar berbagai persoalan teknis di daerah dapat segera diatasi. Pendampingan mencakup kesiapan lahan, pengangkutan sampah, hingga aspek lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap persoalan sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan di berbagai daerah.

“Oleh karena itu, kita harus

segera menyelesaikan permasalahan sampah yang sejak lama menjadi beban lingkungan, polusi tanah, air, udara, mengancam kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten dan kota. Tahap awal diprioritaskan untuk wilayah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari atau daerah yang telah masuk kategori darurat sampah.

Zulkifli Hasan juga menargetkan persoalan sampah di kawasan perkotaan dapat mulai terurai secara bertahap dalam tiga tahun mendatang. Separuh proyek ditargetkan selesai pada 2027 dan sisanya rampung pada Mei 2028.

“Untuk membuat Indonesia bersih dan asri. Asri itu aman, sehat, resik, indah. Yang terus disampaikan kepada Presiden. Khususnya di perkotaan dalam 3 tahun ke depan. Jadi separuh akan selesai di 2027. Separuh lagi di Mei 2028,” ujarnya.

Sedangkan, *Chief Investment Officer* (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan proyek PSEL menjadi salah satu proyek besar dari sisi investasi dan pendanaan.

Menurut dia, kebutuhan penggalangan dana proyek tersebut mencapai US\$5 miliar sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. *(JIBI/Bisnis.com/Antara)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005